

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Anjarsari, N. N. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Bank Indonesia. (2000). *Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bohari. (2004). *Pengantar Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada.
- BPPK. (2017, September 4). *Tugas Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment*. Diambil kembali dari Portal BPPK: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-tugas-pengawasan-direktorat-jenderal-pajak-dalam-sistem-perpajakan-self-assessment-2019-11-05-0123d3d4/>
- Darmayasa, I. &. (2016). Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Witholding Tax System. *Jurnal InFestasi*, 203-216.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan DJP 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Ermadiani., T. R. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI*.
- Hardiningsih, P. &. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 126 - 142.
- Ilyas, W. B. (2007). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Intan, N. (2021, Juni 11). *Kemenkeu: Rasio Pajak Indonesia Turun Lima Tahun Terakhir*. Diambil kembali dari Republika Online: <https://www.republika.co.id/berita/quizft383/kemenkeu-rasio-pajak-indonesia-turun-lima-tahun-terakhir>
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2020). *PMK 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). *Distribusi Simpanan Bank Umum Oktober 2021*.
- Mahpur, M. (2017). Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding. *Repository UIN Malang*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Penerbit Andi.

- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nursidi. (2015). *Tesis FH UI: Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dan Pembukaan Akses Rahasia Bank*. Depok.
- Parikesit, H. S. (2021). *Analisis Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo*.
- Permanasari, D. A. (2013). *TESIS FH UI: Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT HI)*. Depok.
- Prasetyo, A. (2017). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rifqiansyah. H., S. M. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.
- Safitri, A. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Penagihan Aktif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu*.
- Setiadi, E. K. (Jakarta). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. 2017: Prenadamedia Group.
- Setiawan, D. A. (2021, Desember 2021). *Target Kepatuhan Laporan SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya*. Diambil kembali dari DDTCTNews: <https://news.ddtc.co.id/target-kepatuhan-lapor-spt-tahun-pajak-2020-tercapai-ini-perinciannya-35110>
- Simanjuntak, K. I. (2020). Pengecualian Rahasia Perbankan Untuk Kepentingan Perpajakan Di Indonesia. *Pena Justisia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tarjo., & K. (2006). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 101 – 120.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

- Wildan, M. (2020, September 25). *Hanya 4,3% Permintaan Data dari Ditjen Pajak yang Dipenuhi Perbankan*. Diambil kembali dari DDTCNews: <https://news.ddtc.co.id/hanya-43-permintaan-data-dari-ditjen-pajak-yang%20dipenuhi-perbankan-24228>
- Wisiswa, P. N. (2021). Mengkaji Praktik Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Yolanda, B. R. (2020). *Tinjauan Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK) terhadap Penyitaan Rekening Keuangan Penanggung Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Tangerang Selatan.
- Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta.
- Zuraida, I. (2010). *Penagihan dan Sengketa Pajak*. Jakarta.